

**TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL EVALUASI
REVIU SAKIP
BPSDM
TAHUN 2022**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)

JL. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

Berdasarkan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 700.04/3204/A.1/Itprov tanggal 29 Juli 2022, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Hasil Evaluasi dari dokumen tersebut dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "Kategori predikat" untuk memberikan gambaran tingkat Akuntabilitas kinerja instansi yang telah dicapai. Dari hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, maka diperoleh nilai 81,25 dengan kategori A (Memuaskan) dibandingkan dengan hasil nilai tahun 2020 yaitu 74,34 dengan kategori BB (Sangat baik) adapun uraian berdasarkan komponen dapat dilihat pada table berikut ini :

NO.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi Tahun 2021
A.	Perencanaan Kinerja	30	23,10
B.	Pengukuran Kinerja	30	24,60
C.	Pelaporan Kinerja	15	12,30
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,25
	Jumlah	100	81,25

Dari Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 ini, masih terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempuranaan, yaitu :

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kondisi ideal atas kinerja yang akan dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , namun perlu dilakukan analisis kebutuhan atas kinerja sebenarnya khususnya terkait dengan penjabaran dari table T-C.31 di Dalam rencana kerja tahunan
- 2) Rencana aksi telah disusun berkala, namun belum memuat laporan yang berisi permasalahan dan rekomendasi serta tidak lanjutnya secara berkala

- 3) Belum terdapat laporan secara berkala atas rekomendasi rencana aksi yang dilakukan

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala , namun belum di lengkapi laporan yang memuat permasalahan , rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilakukan

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja
- 2) Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan khususnya capaian program dan output kegiatan
- 3) Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja)
- 4) Belum terdapat laporan secara berkala sebagai laporan akhir tahun yang digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

d. Capaian Kinerja

- 1) Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
- 2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya untuk perbaikan dan peningkat akuntabilitas kinerja.

Dari Hasil evaluasi tersebut , direkomendasikan kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan agar melakukan perbaikan atas Akuntabilitas kinerjanya sebagai berikut :

- 1) Menyusun analisis kebutuhan atas kinerja sebenarnya khususnya terkait dengan penjabaran dari table T-C.31 di dalam rencana kerja tahunan
- 2) Menyusun laporan secara berkala atas perjanjian kinerja dan rencana aksi yang memuat permasalahan serta rekomendasi tindak lanjutnya
- 3) Menyusun laporan kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan khususnya capaian program dan output kegiatan
- 4) Menyusun laporan kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional/internasional (Benchmark kinerja)
- 5) Menyusun laporan secara berkala/triwulanan sebagai bahan rumusan laporan kinerja akhir tahun
- 6) Memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal

7) Memanfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Badan pengembangan Sumberdaya manusia Provinsi Sulawesi Selatan telah menindak lanjuti keseluruhan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020.

**KOMPILASI
TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL
REVIU SAKIP
BPSDM
TAHUN 2022**

KOMPILASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL REVIW SAKIP BPSDM TAHUN 2022

No.	Nomor dan Tanggal LHP	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	700.04/3204/A.1/Itprov Tanggal 29 Juli 2022	<p>1. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kondisi ideal atas kinerja yang akan dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , namun perlu dilakukan analisis kebutuhan atas kinerja sebenarnya khususnya terkait dengan penjabaran dari table T-C.31 di Dalam rencana kerja tahunan</p> <p>2. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala , namun belum di lengkapi laporan yang memuat permasalahan , rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilakukan</p> <p>3. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan khususnya capaian program dan output kegiatan</p> <p>4. Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja)</p>	<p>1. Menyusun analisis kebutuhan atas kinerja sebenarnya khususnya terkait dengan penjabaran dari table T-C.31 di dalam rencana kerja tahunan</p> <p>2. Menyusun laporan secara berkala atas perjanjian kinerja dan rencana aksi yang memuat permasalahan serta rekomendasi tindak lanjutnya</p> <p>3. Menyusun laporan kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan khususnya capaian program dan output kegiatan</p> <p>4. Menyusun laporan kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional/ internasional (Benchmark kinerja)</p>	<p>Telah terlampir pada Laporan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan memuat analisis kebutuhan atas kinerja terkait dengan penjabaran dari table T-C.31 terdapat pada hal.46</p> <p>Telah tersusun pada Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Triwulan tahun 2022</p> <p>Telah terlampir pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 terdapat pada hal.24</p> <p>Telah terlampir pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 terdapat pada hal.23</p>

No.	Nomor dan Tanggal LHP	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		<p>5. Belum terdapat laporan secara berkala sebagai laporan akhir tahun yang digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.</p> <p>6. Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)</p>	<p>5. Menyusun laporan secara berkala/triwulanan sebagai bahan rumusan laporan kinerja akhir tahun</p> <p>6. Memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p>	<p>Telah Tersusun pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulanan tahun 2022</p> <p>Telah terlampir pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 berupa Aplikasi E-CORE yang memuat informasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal terdapat pada hal.42</p>
		7. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya untuk perbaikan dan peningkat akuntabilitas kinerja	7. Memanfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Telah Terlampir Matriks Realisasi dan Capaian Kinerja BPDM Prov.SulSel triwulan IV Tahun 2022 pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 terdapat pada hal. 43

DOKUMEN

PERBAIKAN LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2022

1. Telah terlampir pada Laporan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan memuat analisis kebutuhan atas kinerja terkait dengan penjabaran dari table T-C.31 terdapat pada hal.46



Antara Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan terdapat beberapa perbedaan, diantaranya :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat penurunan pagu berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari Rancangan Awal RKPD 2023, penurunan pagu terdapat pada kegiatan :
 - Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat penurunan pagu berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari Rancangan Awal RKPD 2023, penurunan pagu terdapat pada kegiatan :
 - Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Penurunan pagu berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari Rancangan Awal RKPD 2023 disebabkan target pendapatan yang menurun dari target tahun sebelumnya, sehingga hal ini berdampak pada kebutuhan anggaran administrasi yang tidak mencukupi.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 seharusnya juga memperhatikan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun usulan-usulan program dan kegiatan Masyarakat tersebut diperoleh dari hasil Musrenbang dimana semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif.

Namun pada pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan, hal ini dapat dilihat pada tabel T-C 32:

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 | 46

2. Telah tersusun pada Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Triwulanan tahun 2022.



3. Telah terlampir pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 terdapat pada hal.24.



Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Meningkatnya Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	85%	84%	98,8%
			Nilai Akreditasi Kelembagaan	82 Nilai (Kategori A)	83 Nilai (Kategori A)	101,21%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SKPD Organisasi Perangkat Daerah	85 Nilai (Kategori A)	81,25 Nilai (Kategori A)	95,5%
			Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98%	98 %	100%
			Persentase Temuan Material	0,10%	0,01%	100%

Sasaran strategis ke-1 yaitu Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat, dimana Indikator Kinerja Utamanya yaitu :

- **Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)** yaitu evaluasi dari Pelatihan yang dilaksanakan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Pelatihan Peningkatan akuntabilitas dan kinerja OPD berbasis Perencanaan, yang ditarget pada tahun 2022 yaitu Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik sebesar 85 terealisasi sebesar 84% sehingga capaian sebesar 98,8% atau *kriteria "Sangat Tinggi"*, dimana pencapaian kinerjanya tercapai dengan keterpenuhinya Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Baik.

- **Nilai Akreditasi Kelembagaan** yaitu evaluasi dari Penilaian Akreditasi yang dilaksanakan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Sarana Prasarana, Tenaga Pengajar, Materi Pembelajaran, dan Kualitas Jaringan Pelatihan yang ditargetkan sebesar Nilai 82 atau Kategori A terealisasi sebesar 83 sehingga capaian sebesar 101,21% atau *kriteria "Sangat Tinggi"*, dimana pencapaian kinerjanya tercapai dengan keterpenuhinya Akreditasi Kelembagaan.

Sasaran strategis ke-2 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, dimana Indikator Kinerja Utamanya yaitu :

- **Nilai SKPD Organisasi Perangkat Daerah** Yaitu sistem yang integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan Pelatihan yang dilaksanakan pada tahun

4. Telah terlampir pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 terdapat pada hal.23



Tabel 3.2
Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja
Provinsi dan Nasional Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian	
			Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	85%	80%	84%	81%	98,8%	101,25%
		Nilai Akreditasi Kelembagaan	82 Nilai (Kategori A)	A	83 Nilai (Kategori A)	85	101,21%	106,25%

Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov.SulSel dapat mencapai sasaran yang ditargetkan pada tahun 2022. Selanjutnya di bawah ini, diuraikan lebih lanjut mengenai capaian masing-masing sasaran, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov.SulSel dapat mencapai sasaran yang ditargetkan pada tahun 2022 sebagai berikut :

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, melalui langkah-langkah yakni :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan;
2. Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai 2 Sasaran Strategis dalam pelaksanaan ketugasannya, ke-dua sasaran tersebut didukung oleh 5 Indikator Kinerja Utama seperti berikut :

5. Telah tersusun pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan tahun 2022



6. Telah terlampir pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 berupa Aplikasi E-CORE yang memuat informasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal terdapat pada hal.42

7. Telah Terlampir Matriks Realisasi dan Capaian Kinerja BPSDM Prov.SulSel triwulan IV Tahun 2022 pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 terdapat pada hal. 43

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV					SISA ANGGARAN YANG BELUM DICAIRKAN	(%)		
					KEUANGAN		% FISIK	KINERJA	CAPAIAN				
					(Rp)	(%)							
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				30.891.049.883,00	29.569.380.007,00	95,72	99,56			1.321.669.876,00	4,28		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0,1	Per센	28.376.657.333,00	27.607.498.705,00	97,29	100,00	0,00	100,00	769.158.628,00	2,71		
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	98	Per센										
	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik	98	Per센										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Per센	764.334.100,00	669.803.824,00	87,63	100,00	100,00	100,00	94.530.276,00	12,37		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah	88	Orang	582.271.000,00	491.834.164,00	84,47	100,00	88	100,00	90.436.836,00	15,53		
	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	2	Dokumen										
	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4	Dokumen										
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersedia	1	Dokumen	30.048.500,00	30.048.500,00	100,00	100,00	1	100,00	0,00	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersedia	1	Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00	1	100,00	0,00	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	12.574.000,00	12.574.000,00	100,00	100,00	1	100,00	0,00	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	21.223.800,00	21.223.800,00	100,00	100,00	1	100,00	0,00	0,00		

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV					SISA ANGGARAN YANG BELUM DICAIRKAN	(%)		
					KEUANGAN		% FISIK	KINERJA	CAPAIAN				
					(Rp)	(%)							
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan dan terpublikasi	10	Laporan	112.216.800,00	108.123.360,00	96,35	100,00	10	100,00	4.093.440,00	3,65		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Per센	20.630.475.232,00	20.463.052.551,00	99,19	100,00	100,00	100,00	167.422.681,00	0,81		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	134	Orang	20.094.950.932,00	19.981.783.861,00	99,44	100,00	134	100,00	113.167.071,00	0,56		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1	Dokumen	401.333.900,00	351.767.490,00	87,65	100,00	1	100,00	49.566.410,00	12,35		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntasi keuangan SKPD	12	Laporan	20.097.000,00	19.857.000,00	98,81	100,00	12	100,00	240.000,00	1,19		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	2	Laporan	46.259.800,00	41.859.800,00	90,49	100,00	2	100,00	4.400.000,00	9,51		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan bahan tanggapan pemeriksa yang disusun	4	Laporan	24.161.300,00	24.161.300,00	100,00	100,00	4	100,00	0,00	0,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD yang disusun	3	Laporan	33.870.300,00	33.870.300,00	100,00	100,00	3	100,00	0,00	0,00		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi anggaran yang disusun	4	Laporan	9.802.000,00	9.752.800,00	99,50	100,00	4	100,00	49.200,00	0,50		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Per센	558.181.900,00	424.137.156,00	75,99	100,00	100,00	100,00	134.044.744,00	24,01		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaianya	134	Orang	558.181.900,00	424.137.156,00	75,99	100,00	134	100,00	134.044.744,00	24,01		

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV					SISA ANGGARAN YANG BELUM DICAIRKAN	(%)		
					KEUANGAN		% FISIK	KINERJA	CAPAIAN				
					(Rp)	(%)							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	1.244.240.240,00	1.007.142.935,00	80,94	100,00	100,00	100,00	237.097.305,00	19,06		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	Unit	53.880.000,00	53.879.732,00	100,00	100,00	5	100,00	268,00	0,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	80	Unit	317.807.800,00	313.782.348,00	98,73	100,00	80	100,00	4.025.452,00	1,27		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK , barang cetakan dan penggandaan	30	Jenis	108.528.800,00	108.528.800,00	100,00	100,00	30	100,00	0,00	0,00		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	40	Jenis	161.495.640,00	131.053.557,00	81,15	100,00	420	100,00	30.442.083,00	18,85		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi (Kab/Kota se sulsel instansi pembina)	24	Kab/Kota se sulsel instansi pembina	602.528.000,00	399.898.498,00	66,37	100,00	24	100,00	202.629.502,00	33,63		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	847.364.723,00	841.101.280,00	99,26	100,00	100,00	100,00	6.263.443,00	0,74		
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	2	Unit	210.000.000,00	209.778.900,00	99,89	100,00	2	100,00	221.100,00	0,11		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang diadakan	1	Tahun	530.814.723,00	527.340.842,00	99,35	100,00	1	100,00	3.473.881,00	0,65		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	3	Unit	106.550.000,00	103.981.538,00	97,59	100,00	3	100,00	2.568.462,00	2,41		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	3.563.010.738,00	3.450.312.845,00	96,84	100,00	100,00	100,00	112.697.893,00	3,16		

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV					SISA ANGGARAN YANG BELUM DICAIRKAN	(%)		
					KEUANGAN		% FISIK	KINERJA	CAPAIAN				
					(Rp)	(%)							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik, internet dan retribusi sampah	12	Bulan	1.958.071.720,0	1.933.492.310,00	98,74	100,00	12	100,00	24.579.410,00	1,26		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	45	Orang	1.604.939.018,0	1.516.820.535,00	94,51	100,00	45	100,00	88.118.483,00	5,49		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Per센	769.050.400,00	751.948.114,00	97,78	100,00	100,00	100,00	17.102.286,00	2,22		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	13	Unit	219.650.060,00	211.779.770,00	96,42	100,00	13	100,00	7.870.290,00	3,58		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	6	Unit	57.540.340,00	51.013.640,00	88,66	100,00	6	100,00	6.526.700,00	11,34		
	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	7	Unit										
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara	3	Aplikasi	30.000.000,00	29.940.000,00	99,80	100,00	3	100,00	60.000,00	0,20		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang dipelihara	40	Unit	274.670.000,00	274.232.604,00	99,84	100,00	40	100,00	437.396,00	0,16		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasana gedung kantor yang dipelihara	140	Unit	114.940.000,00	113.000.790,00	98,31	100,00	140	100,00	1.939.210,00	1,69		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasana Pendukung gedung kantor yang dipelihara	20	Unit	72.250.000,00	71.981.310,00	99,63	100,00	20	100,00	268.690,00	0,37		

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV					SISA ANGGARAN YANG BELUM DICAIRKAN	(%)		
					KEUANGAN		% FISIK	KINERJA	CAPAIAN				
					(Rp)	(%)							
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Managerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	100	Persen	2.514.392.550,00	1.961.881.302,00	78,03	99,13	105,51	105,51	552.511.248,00	21,97		
Pengembangan Kompetensi Teknis	Percentase Pengembangan Kompetensi Teknis	100	Persen	1.372.847.150,00	1.108.929.578,00	80,78	99,47	100,00	100,00	263.917.572,00	19,22		
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Revolusi Mental	30	Orang	792.948.750,00	719.506.303,00	90,74	100,00	30	100,00	73.442.447,00	9,26		
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemerintahan	55	Orang					55	100,00				
	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan teknis	159	Orang					159	100,00				
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kab./Kota yang difasilitasi diklat Teknis, Fungsional dan Pemerintahan	24	Kab/Kota se sulsel instansi pembina	579.898.400,00	389.423.275,00	67,15	98,75	24	100,00	190.475.125,00	32,85		
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Percentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	Persen	1.141.545.400,00	852.951.724,00	74,72	98,78	100,00	100,00	288.593.676,00	25,28		
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Sertifikasi Akreditasi Lembaga Daearah dan standar penyelenggaraan pelatihan	3	Dokumen	227.619.200,00	162.881.666,00	71,56	100,00	3	100,00	64.737.534,00	28,44		
	Jumlah Peserta/Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Melalui ASN Corporate University	25	Orang					25	100,00				
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Kerjasama Luar/Dalam Negeri/Lembaga/Pemerintah Daerah	6	MOU/PKS	101.337.200,00	59.575.292,00	58,79	98,25	6	100,00	41.761.908,00	41,21		

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV				SISA ANGGARAN YANG BELUM DICAIRKAN	(%)		
					KEUANGAN		% FISIK	KINERJA	CAPAIAN			
					(Rp)	(%)						
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Sosialisasi/Seminar/Workshop Kerjasama	55	Orang	537.669.400,00	414.015.166,00	77,00	97,75	30	100,00	123.654.234,00	23,00	
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	30	Orang		216.479.600,00	78,74	100,00	180	100,00			
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Latsar	180	Orang					100	100,00			
Pembinaan,Pengoordinasian,Fasilitasi,Pemantauan, Evaluasi,dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,Pengelolaan Sumber Belajar,dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Kab./kota yang difasilitasi diklat Revmen,kepemimpinan dan latsar	24	Kab/Kota se sulsel instansi pembina	274.919.600,00	216.479.600,00	78,74	100,00	24	100,00	58.440.000,00	21,26	



Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19680202 199403 1 009